

**PELAKSANAAN TUPOKSI KEPALA DESA DALAM MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI DESA KOTO CENGAR
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Yuwandi Setiawan

Email : yuwandi.setiawan@yahoo.com

Pembimbing : **Zulkarnaini S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi , Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The village head as the head of government in the scope of the village should be able to perform optimum duties, either as a public servant or as an intermediary who can provide solutions to problems that exist within the community that includes the area of authority. The aspirations conveyed by the community must be heard by a village head so that what is the goal can be achieved in accordance with expectations. But in the reality of the field is still a lot of problems, this is due to lack of implementation of the head of the Lead Countryside tupoksi.

The purpose of this research is to know the implementation of tupoksi village head in koto cengar village in creating peace and order as well as what factors hamper the implementation of tupoksi village head in creating peace and order in koto cengar village. To analyze the phenomenon in this study the authors use Winardi theory with appropriate time utilization indicators, the amount of output, willingness to cooperate, quality of work. The method used in this research is descriptive with qualitative approach.

Results of this study show the implementation of the tupoksi village head in creating peace and order in the village koto cengar kuantan mudik district Kuantan singingi district has not been done well with the existence of several cases that disturb the peace and order of society. The inhibiting factors found were communication, human resource placement, facilities and infrastructure, factors of society.

Keyword : Implementation of Tupoksi, Lead countryside, peace and order

PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

Adapun permasalahan yang dihadapi aparat birokrasi desa dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi masalah internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi aparat pemerintah desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat (Freemont:2002,10).

Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat

harus didengar dan tindak lanjutnya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan desa merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara dan sebagai masyarakat desa, terutama kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang telah di berikan amanah oleh masyarakat untuk sebagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan ketertiban desa adalah bagaimana tindakan kepala desa terhadap pencegahan terjadinya hal –hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban desabekerja sama dengan aparatur desa beserta seluruh unsur masyarakat dalam hal ini kepala desa berkewajiban membuat kebijakan atau peraturan desa yang nantinya akan menciptakan suasana aman, tentram dan tertib dalam masyarakat desa.

Berdasarkan laporan dari Polsek kecamatan kuantan mudik Tahun 2016, beberapa kasus di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi pada lima tahun terakhir yaitu 1 kasus pada tahun 2012, 4 kasus pada tahun 2013, 3 kasus pada tahun 2014, dan 2 kasus pada tahun 2015 serta 7 kasus pada tahun 2016, yang dianggap mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban Desa Koto Cengar. Dengan adanya beberapa kasus diatas, seharusnya kepala desa tanggap dalam mengambil tindakan untuk menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketertiban berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepala desa.

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan TUPOKSI Kepala Desa dalam Menciptakan ketentraman dan Ketertiban di Desa Koto Cengar ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan TUPOKSI Kepala Desa dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di Desa Koto Cengar ?

KONSEP TEORI

1. Organisasi

Organisasi dapat di artikan 2 macam yaitu :

1. Dalam arti statis, organisasi merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hirarkhi daripada kedudukan, jabatan wewenang, garis komando dan tanggung jawab.
2. Dalam arti dinamis, organisasi merupakan proses kerjasama antara orang-orang yang bergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah di tetapkan secara bersama. (Wur-santo 2005:43).

Robbins (2002:5) menyatakan organisasi merupakan kesatuan (entity) social yang dikoordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi itu ada untuk mencapai tujuan-tujuan, kemudian seseorang (pemimpin)

harus menetapkan tujuan-tujuan tersebut dengan alat atau cara yang dapat di gunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Thoha (2007 :117) pemahaman organisasi dari sebuah kelompok menekankan adanya peningkatan efisien lewat pengerangkaan (struktur) dan pengendalian (controlling) dari partisipasi manusia. Orang-orang yang berada pada kelompok ini diduga bahwa dapat termotivasi dengan cara memberikan intensif ekonomi.

Menurut Winardi (2003:96) mengatakan bahwa struktur organisasi (organizing structure) dapat di rumuskan sebagai pengaturan dan antar hubungan bagian-bagian komponen dan posisi-posisi suatu perusahaan. Lebih lanjut winardi mengatakan struktur organisasi menspesifikasi aktivitas-aktivitas kerjanya dan ditunjukan olehnya bagaimana berbagai fungsi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda berkaitan satu sama lain hingga dapat tingkat tertentu ia menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas-aktivitas pekerjaan.

2. Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering di sebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Syafi'ie (2003:126) mengatakan pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang di arahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung

jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Winardi (2003:24) Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan dalam ilmu administrasi Negara, fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi dilapangan.

3. Teori kepemimpinan dan pemimpin

Menurut Thoha (2010: 9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Menurut Kartono (2003: 58) kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Kepemimpinan semacam ini bersifat informal dan selalu berkaitan dengan kebutuhan - kebutuhan kelompok

pada saat khusus dan tempat khusus untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Konsep Desa

Menurut Nawawi (2003:24) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa india yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang berujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Wursanto (2005 : 12) ditinjau dari segi ekonomi desa merupakan sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi. Pendapat diatas menjelaskan bahwa desa merupakan kelompok sosial ekonomi kecil yang berasaskan ikatan kekeluargaan dimana rasa saling tolong menolong dan rasa setia kawan sosial lebih diutamakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bagaimana keadaan didesa tersebut.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, adapun alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti merupakan warga di desa seberang cengar yang merupakan tetangga desa koto cengar, dengan ini selain peneliti

lebih mudah untuk meneliti, tetapi juga meringankan biaya peneliti dalam melakukan penelitian. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini dikarenakan peneliti melihat bahwa terdapat fenomena masalah yang dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa yang kurang optimal.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan tentang pelaksanaan TUPOKSI kepala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa koto cengar yaitu:

1. Kepala Desa/ Sekretaris Desa
2. Ketua BPD
3. Tokoh masyarakat
4. Masyarakat Desa Koto Cengar.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Dokumentasi

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik dimungkinkan pemahaman fakta dan data seakurat mungkin karena terhadap data yang diperoleh dilakukan interpretasi dan pemahaman lebih dalam. Oleh karena itu selain mengandalkan data sekunder, maka penelitian ini juga menggunakan teknik pengamatan (observasi) yang memungkinkan peneliti melakukan interaksi lebih dalam dengan objek yang diteliti. Metode pendekatan kualitatif deskriptif ini juga merupakan metode yang sangat tepat menurut penulis

dalam mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga penulis bisa mendapatkan dan mengolah data menjadi karya tulis yang dapat member manfaat serta dampak positif terhadap penulis dan pembaca yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan TUPOKSI Kepala Desa dalam Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pemanfaatan waktu yang tepat
Dalam melakukan pemanfaatan waktu yang tepat ada dua indikator yang dapat menunjang yaitu : Menetapkan Peraturan Desa dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa selama masa jabatannya menjadi Kepala Desa, Kepala Desa memanfaatkan waktu jabatannya dengan baik, beliau selalu berusaha ada ditengah masyarakat dan berusaha agar tetap ada jika masyarakat membutuhkannya.

2. Jumlah Output

Jumlah output merupakan beberapa hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam mengetahui apa – apa saja hasil yang diperoleh seseorang dalam sebuah tujuan, baik individu maupun kelompok orang, dan juga jumlah produksi. Dalam hal

ini jumlah output pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia mengaju pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Berdasarkan hasil wawancara, hasil kinerja selama Kepala Desa menjabat beliau cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan misalnya kejadian kehilangan atau pencurian langsung dibicarakan dan solusinya diadakan ronda sehingga bisa menimalisir tindak kejahatan di Desa Koto Cengar.

3. Kesiapan untuk bekerja sama

Kesiapan untuk bekerja sama merupakan mampu bekerja-sama dengan sesama aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan yang diberikan hanya sebatas teorinya saja penerapan dilapangan ditidak diterapkan, karena terkendala dengan kemampuan dan yang lainnya. Kualitas pekerjaan Kepala Desa dalam menjalankan TUPOKSInya belum berjalan dengan baik terkait hal pelatihan-pelatihan dari berbagai pelaksana hanya sebatas pengetahuan

untuk mereka saja tidak diterapkan di Desa itu sendiri.

4. Kualitas Pekerjaan

Kualitas pekerjaan merupakan suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau yang dilaksanakan seseorang atas tugas-tugasnya. Inti dari kualitas pekerjaan adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber lainnya dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan Kepala Desa dalam menjalankan TUPOKSInya belum berjalan dengan baik terkait hal pelatihan-pelatihan dari berbagai pelaksana hanya sebatas pengetahuan untuk mereka saja tidak diterapkan di Desa itu sendiri.

B. Faktor- Faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Sekretaris Desa Koto Cengar serta pengamatan langsung yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan beberapa factor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi anatar lain sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu timbal balik atau bertukar pikiran antara satu orang atau lebih. Sebagai masyarakat tidak akan bisa hidup sendiri dan semuanya membutuhkan bantuan orang lain dalam segala keberlangsungan hidup. Komunikasi sangatlah penting bagi suatu pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan Desa. Jika Desa mengadakan suatu acara atau kegiatan yang membahas pembangunan desa maka Kepala Desa, beserta jajaran lainnya dan masyarakat harus kompak dan melakukan komunikasi agar terciptanya sebuah kejelasan dan tidak terjadi salah paham dari segala proses tersebut.

Komunikasi dalam pembangunan Desa haruslah dilihat sebagai suatu proses menyeluruh termasuk pemahaman terhadap khalayak serta kebutuhan-kebutuhannya, perencanaan, strategi-strategi yang terpilih,, pembuatan pesan-pesan, penyebaran, penerimaan balik terhadap pesan-pesan itu, dan bukan hanya kegiatan langsung satu arah dari komunikator kepada penerima pasif melainkan yang dilakukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa kepada bawahannya dan masyarakat.

Komunikasi yang baik dari Kepala Desa merupakan hal yang dapat menjadikan keberlangsungan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta tepat pada sasaran sehingga tugasnya sebagai Kepala Desa dapat dikatakan

terlaksana dengan baik. Jika Kepala Desa tidak berkomunikasi yang baik dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan lainnya maka akan kerap terjadi kesalahpahaman dikarenakan kurangnya komunikasi.

Dari ungkapan diatas dapat dikatakan bahwa Komunikasi yang baik dari kepala desa dengan bawahannya juga turut serta dengan masyarakat. Untuk bisa Melaksanakan segala sesuatunya di pemerintahan desa komunikasi sangatlah penting, kalau tidak begitu maka tidak akan berjalan efektif dan efisien pemerintahan desa ini.

2. Penempatan SDM yang tidak pada bidangnya

Sumber daya manusia sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal pekerjaan dan memuaskan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut, dengan adanya SDM yang handal maka Program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksanakan dengan baik dan akan tepat sasaran. Dalam memilih SDM harus dilakukan dengan selektif agar apa yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh SDM itu (Soejadi: 1986,47).

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang ada di dunia ini mampu dan mau meluangkan diri untuk melakukan sesuatu pekerjaan

yang bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri. Sumber daya manusia sering disebut SDM hal yang lain disebutkan sejalan dengan SDM adalah sumber daya alam atau sering disebut SDA yang merupakan tempat dimana SDM tadi melakukan pekerjaan dan tempat tinggal mereka. SDM di perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih supaya dia dapat berkembang didalam usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara dilihat bahwa penempatan SDM bukan tidak pada bidangnya akan tetapi para aparatur desanya yang mempunyai kesibukan yang lain dan melalaikan tugasnya sebagai aparat desa.

3. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja (Armosudiro:2006, 87).

Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan

peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Hasil wawancara yang diperoleh diketahui bahwa memang sarana dan prasarana di desa koto cengar masih agak kurang, tidak adanya balai desa dan pos ronda yang sudah mau hancur akibat tidak lagi digunakan.

5. Faktor dari Masyarakat

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan Desa yang salah satunya bertujuan menggerakkan masyarakat sehingga masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa dan pembangunan nasional. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan merupakan ujung tombak Pemerintahan Pusat, sehingga Peran Kepala Desa diawasi oleh BPD terlebih lagi oleh masyarakat itu sendiri. Namun jika masyarakat itu sendiri kurang peduli dengan kinerja dari Kepala Desa dan kurang peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, ini adalah kondisi yang sering terjadi di lapangan bahwa selama ini masyarakat sendiri kebanyakan kurang peduli akan keberhasilan pelaksanaan tugas kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa diperoleh bahwa masih rendahnya kepedulian warga terhadap kemajuan desa. Hal ini membuat pemerintahan desa pun merasa kesulitan untuk mengajak. Masyarakat sepertinya memang menjadi PR untuk pemerintahan desa dalam menumbuhkan rasa memiliki itu. Penyakit yang paling susah di

hapuskan dari masyarakat adalah cemburu sosial yang masih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara tingkat atau faktor dari masyarakatnya kurang, masyarakat jarang aktif ikut berpartisipasi dalam urusan desa dan terutama pemuda-pemudanya yang seharusnya penerus generasi bangsa enggan mengikuti apa yang dilaksanakan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan tupoksi kepala desa sangat berpengaruh besar terhadap berjalannya tugas dan fungsi kepala desa, berdasarkan factor penghambatnya dapat dilihat dari semuanya yang paling berpengaruh menghambat berjalannya tugas pokok dan fungsi kepala desa yakni dilihat dari factor masyarakat, dikarenakan seharusnya masyarakat sangat berperan aktif dalam membantu kepala desa, akan tetapi dapat dilihat disini bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan TUPOKSI Kepala Desa dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban yang diukur melalui indikator-indikator yaitu Pemanfaatan waktu yang tepat, Jumlah output, Ketersediaan untuk bekerja sama, dan juga kualitas pekerjaan belum terlaksana

dengan baik dengan masih adanya terjadi beberapa kasus-kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa tersebut yaitu Faktor yang menghambat tersebut yaitu :
 - a. Komunikasi, Seorang Kepala desa sangat dibutuhkan cara berkomunikasi yang efektif dengan BPD, aparat pemerintah desa lainnya dan masyarakat tentunya. Sehingga segala hal mengenai program, administrasi, dan kegiatan kegiatan lainnya akan mudah terlaksana.
 - b. Faktor Penempatan Sumber Daya Manusia yang tidak pada bidangnya, Kepala Desa harus selektif dalam memilih SDM yang akan ditempatkan di posisi pemerintahan Desa, bila SDM tersebut tepat pada bidangnya maka akan terlaksana segala urusan dalam membangun desa dan memudahkan Pelaksanaan TUPOKSI Kepala Desa.
 - c. Sarana dan Prasarana, masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan tugas Kepala Desa. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja dari aparat Desa agar pekerjaan mereka bisa segera terlaksana

dan memberikan kebaikan untuk desa.

- d. Faktor dari masyarakat, masih rendahnya animo masyarakat untuk lebih mengawasi dan membantu pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan Pelaksanaan TUPOKSI Kepala Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, ada pun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Desa Koto Cengar dan aparaturnya lebih meningkatkan lagi pelaksanaan tugasnya dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, tentunya dengan menerapkan komunikasi kerja sama dan pendekatan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan TUPOKSI kepala desa ini.
2. Diharapkan Kepala Desa dan aparaturnya supaya lebih menimbulkan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap desa dan juga kemampuan dan keterampilan tentang kam-tibmas dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan mengaplikasikannya di desa. Kepala Desa hendaknya bisa menjadi teladan bagi masyarakat terutama pemuda untuk menjaga dan menimbulkan rasa memiliki

terhadap desa, mengajak untuk menciptakan ketentraman ketertiban di desa sehingga masyarakat bisa aman, tentram dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Armosudiro, pradjuji. 2006. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Fremont E. Kast dan James E. Rozenweig, 2002. *Organisasi Dalam Manajemen 1 Edisi Keempat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Nawawi. 2003. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Robbin, Stephen, Patel. 2002. *Perilaku Organisasi*. Bandung : PT Mandar Maju
- Soejadi, Edi. 1986. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Thoha, Mifta. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : PT Rajawali Press

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Grafindo Persada

Wursanto, Ignasius, 2005. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.